

Analisis Pembinaan Masyarakat Pesisir Berbasis Budaya Lokal Oleh Staf Potensi Maritim Lanal Bangka Belitung Dalam Mendukung Pertahanan Negara

Agus Daryono¹, Salim², Poppy S. Nurisnany³

1. Perwira Mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan ke-59 TA 2021. E-Mail: gusdar860@gmail.com

2. Wakapusjianmar Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Republik Indonesia

3. Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Indonesia

Abstract: This research will examine the empowerment of coastal communities in Belitung Regency. The purpose of the Implementation of The Empowerment of Marine Defense Areas is: In perspective it aims to prepare the sea defense area and its supporting forces early in order to win the war. In the perspective of community interests aim to help overcome community difficulties and improve the welfare of maritime communities. In the perspective of tni interests aim to achieve the main task of the Navy, in improving the defense of the country. The general purpose of this study is to analyze the Marine Defense Area Empowerment Strategy by Lantamal III / JKT in Improving State Defense in Belitung Regency. Research uses qualitative methods. Data obtained from the informants is established and further analyzed with qualitative analysis techniques.

Keywords: Community Development, Local Culture, Maritime Potential

1. Pendahuluan

Penelitian ini mengkaji tentang pembinaan masyarakat pesisir berbasis budaya lokal yang dilakukan oleh staf Potmar Lanal Bangka Belitung dalam upaya mendukung pertahanan negara. Penelitian tentang masyarakat pesisir penting dilakukan karena berdasarkan pada data yang dirilis oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan bahwa luas wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.110.000 km² dan laut territorial seluas 290.000 km². Luas wilayah berdaulat, terdiri dari Zona Tambahan seluas 270.000 km², Zona Ekonomi Eksklusif 3.000.000 km², Landas Kontinen seluas 2.800.000 km². Lebih lanjut, dijelaskan bahwa luas perairan Indonesia yaitu 6.400.000 km² dan Luas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari daratan dan perairan, yaitu seluas 8.300.000 km² dengan panjang garis pantai 108.000 km (Sukamto, 2017).

Potensi besar yang dimiliki laut Indonesia saat ini mampu memberikan kontribusi besar sebanyak 10% dalam komoditas perikanan dunia. Selain sumber daya ikan, laut Indonesia juga memiliki potensi kekayaan lain yang mencakup tumbuhan laut, mineral dan pertambangan, transportasi dan pembangunan serta wisata bahari (Sukamto, 2017). Selain ikan, tumbuhan laut dalam hal ini rumput laut juga merupakan potensi alam laut Indonesia yang memiliki nilai ekonomi dan gizi. Dari keseluruhan jumlah biota laut wilayah habitat rumput laut mencapai 1,2 juta hektar sekaligus menjadikannya terluas di dunia.

Sebagai wilayah tropis laut Indonesia memiliki sumberdaya plasma nutfah atau rumput laut sebesar 6,42% dari keseluruhan biodiversitas rumput laut dunia. Berperan sebagai penjaga ekosistem laut rumput laut memiliki nilai ekonomi sebagai bahan utama pada produk kesehatan dan industri yang dibutuhkan manusia (Suproharto).

Selain potensi ikan dan rumput laut, laut Indonesia juga memiliki potensi yang besar dengan kekayaan mineral logam seperti emas, perak, timah, timbal, tembaga dan nikel. Di seluruh wilayah Indonesia terdapat 60 cekungan minyak dan gas dengan komposisi 70% terletak di laut, serta cadangan minyak bumi yang mencapai 9,1 miliar barel yang terletak di perairan lepas (*off share*). Dalam data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) potensi energi yang dimiliki dari arus laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Potensi tersebut mencakup *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC) yang berada di 17 wilayah Indonesia dari pantai barat Sumatera Selatan Jawa, Sulawesi, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam transportasi dan perhubungan wilayah laut Indonesia merupakan wilayah strategis jalur laut yang menghubungkan kawasan regional dan dunia. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Indonesia yang memiliki garis pantai terpanjang ke empat dunia sepanjang 95.181 km² dengan 17.480 pulau. Dan terakhir pada potensi wisata bahari laut Indonesia merupakan salah satu daya tarik destinasi wisata dunia.

Selain dengan kekayaan sumber daya dan biota laut, laut Indonesia juga memiliki kekayaan terumbu karang cantik dengan beragam spesies koral serta ikan yang menarik wisatawan untuk datang berwisata. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa laut Indonesia memiliki potensi besar sebagai penopang perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Berikut ini adalah gambar potensi besar laut Indonesia.

Gambar 1.1 Potensi Besar Laut Indonesia



Sumber: kata data <https://katadata.co.id/adekmediaroza/infografik>, 2017

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari jumlah keseluruhan masyarakat miskin nasional 7,87 juta jiwa atau 25,14% dalam persentase bergantung dengan pengelolaan sumber daya laut. Penyebaran masyarakat miskin ini tersebar pada 10.666 desa pesisir yang terletak di 300 kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi laut dan menjadikannya sebagai sumber perekonomian masyarakat adalah Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan wilayah dengan luas

81.725,06 km² yang terbagi pada luas daratan mencapai 16.424,06 km² atau 20,10% dan 65.301 km² wilayah lautan atau 79,09% dari total keseluruhan wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bangka Belitung memiliki luas wilayah laut yang lebih besar daripada daratan, sebagian besar masyarakat Bangka Belitung memilih profesi sebagai petani, penambang di sektor pertambangan dibandingkan dengan pengelolaan wilayah laut. Kontribusi di bidang pertambangan khususnya timah di wilayah Bangka Belitung mencapai 24,37% dan di sektor pertanian sebesar 42,65% dan perkebunan mencapai 19,01% dari jumlah total kegiatan ekonomi daerah. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan sektor kelautan dan perikanan yang hanya berkisar di angka 7,35% dan industri pengolahan sebesar 2,44% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Masyarakat pesisir sebagai pihak yang diprioritaskan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut harus dapat memiliki informasi dan kecakapan yang mumpuni untuk dapat mengelola sumber daya laut dan pengolahan wilayah pesisir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam pengolahan pesisir dan ruang laut di provinsi Bangka Belitung. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berkaitan erat dengan pengetahuan ataupun perilaku masyarakat pesisir yang belum menyadari bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dapat merugikan dan mengancam keamanan serta pertahanan negara. Tindakan-tindakan illegal yang dilakukan oleh masyarakat pesisir berpotensi menjadi ancaman bagi pertahanan wilayah laut, bahkan dalam lingkup yang lebih luas yaitu pertahanan negara.

Terkait tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI), merujuk pada UU Republik Indonesia No 34 Tahun 2004, pada Pasal 7 Ayat 2 dijelaskan bahwa salah satu tugas operasi militer selain perang (OMSP) yaitu memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Lebih lanjut, terkait dengan penelitian ini, Pasal 9 poin b dan c menyatakan bahwa salah satu tugas TNI Angkatan Laut (TNI AL) adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut (Dalwilhanla). Dalam hal ini, pemberdayaan wilayah dilakukan dengan tujuan mewujudkan pertahanan negara melalui optimalisasi sumber daya kelautan melalui pembinaan potensi maritim. Pembinaan potensi maritim diharapkan dapat menjadi sarana edukasi masyarakat pesisir untuk dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan pertahanan laut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari makna, pemahaman, pemngertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dalam setting atau latar alamiah, kontekstual dan menyeluruh. Dalam hal ini, peneliti kualitiatif berupaya mengerti makna dari suatu peristiwa. Pemahaman makna tentang sesuatu dalam penelitian kualitatif selalu menempatkan subjek penelitian dalam posisi yang sama dengan peneliti(Yusuf,).

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, sehingga disebut juga dengan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan format deskriptif kualitatif (Bungin,2017) bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi atau realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memberikan deskripsi dan mengungkapkan makna serta melihat proses tentang pembinaan masyarakat pesisir yang dilakukan oleh staf Potmar Lanal Babel, dimana pembinaan yang dilakukan berbasis budaya lokal dalam mendukung pertahanan negara.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan sekumpulan infomasi yang diperoleh secara langsung dari informan berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder merupakan sekumpulan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh orang lain (Martono,2015). Data sekunder diperoleh melalui berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.

Pada penelitian kualitatif, instrument penelitian utama adalah manusia, yaitu peneliti. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk membantu melakukan wawancara yang disebut dengan pewawancara (Afrizal,2014). Dalam mengumpulkan data di lapangan, peneliti memerlukan instrumen tambahan yang dapat membantu pengumpulan data lebih efektif. Instumen tersebut dapat berupa pedoman wawancara, alat perekam, alat tulis, kamera untuk dokumentasi kegiatan, dan alat-alat lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan model pengolahan data Miles and Hubeman melalui Langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: reduksi data, display data, dan verifikasi data (Sugiyono, 2012:92).

3. Hasil dan Pembahasan

Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Laut

Pelaksanaan otonomi daerah termasuk dalam hal ini desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam akan memberikan implikasi dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya dimasa lalu. Terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, implikasi dan konsekuensi tersebut diantaranya adalah :

a. Kelembagaan

Dalam era desentralisasi ini setiap daerah harus membenahi struktur dan peran serta integrasi fungsi kelembagaan yang ada. Khusus untuk sumberdaya pesisir dan laut, hal ini menjadi sangat penting mengingat seluruh daerah propinsi dan sebagian besar daerah kabupaten memiliki wilayah laut yang luas. Tanpa pendekatan kebijakan dan kelembagaan yang punya kewenangan jelas terpadu maka masalah pengelolaan sumberdaya kelautan dimasa lalu akan terulang kembali di daerah.

b. Sumberdaya Manusia

Sebagai bagian terpenting dalam pembangunan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut mutlak diprioritaskan oleh setiap daerah yang menjadikan pesisir dan laut sebagai tumpuan pertumbuhan daerah. Kegiatan-kegiatan pelatihan baik degree maupun non-degree yang sifatnya teknis atau manajerial harus terus dikembangkan.

c. Fiskal/Keuangan

Kebijakan desentralisasi fiskal mengharuskan setiap daerah untuk meningkatkan akuntabilitas, optimalisasi/efisiensi anggaran dan mengembangkan mekanisme pendanaan yang lebih terpadu. Kesatuan pendanaan dinilai sangat penting, karena banyak proyek yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir bersumber dari dana yang berbeda-beda. Setiap daerah harus menyadari bahwa pembangunan kelautan tidak lagi menjadi semata-mata tanggung jawab sektor terkait (DKP, Depkimpraswil dll), departemen sektoral tidak lagi mempunyai alokasi dana pembangunan yang besar sesuai dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang baru. Penentuan skala prioritas, bentuk dan jangka waktu penanganan masalah merupakan satu cara untuk mengefektifkan pendanaan yang ada.

d. Praktek Pengelolaan

Masa-masa sepanjang tiga dekade yang lampau telah menjadi beban yang berat bagi sumberdaya pesisir dan laut di Indonesia. Seperti halnya hutan, sumberdaya ini telah mengalami kerusakan parah akibat beban eksploitasi komersial yang hanya bertujuan mengejar keuntungan jangka pendek semata. Hal ini jelas menghancurkan dan merusak sistem tradisional pengelolaan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadikan masyarakat nelayan sebagai golongan paling miskin diantara kelompok masyarakat miskin lainnya di Indonesia. Dalam era desentralisasi praktek-praktek pengelolaan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga tujuan ekonomi tidak akan mengorbankan aspek kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemain utama di daerahnya harus saling mendukung dan mengontrol pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir dan laut di wilayahnya.

e. Partisipasi Masyarakat

Pendekatan pembangunan selama ini yang bersifat masif dan seragam tidak membawa dampak positif bagi masyarakat, karena umumnya desain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok dominan (mainstream) dalam kekuasaan, modal, dan akses terhadap birokrasi. Sebagai satu kesatuan sosial, masyarakat dan khususnya masyarakat adat tidak diuntungkan. Masyarakat khususnya untuk masyarakat adat yang

berada di kawasan pesisir dan laut, seringkali tidak terwakili aspirasinya dalam proses pembangunan atau mendapatkan keuntungan dari proses itu. Padahal mereka harus diberi keleluasaan untuk melindungi dirinya dan budayanya serta menolak perubahan yang berdampak negatif bagi kehidupannya. Konsep penentuan nasib sendiri ini (self determination) telah luas diterima dalam prinsip-prinsip internasional, namun memang masih jauh dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Pelaksanaan PP No. 25/2000 telah menimbulkan berbagai interpretasi kurang kondusif bagi pelaksanaan ekonomi sehubungan dengan batas kewenangan daerah di wilayah laut yang menyatakan kewenangan propinsi sampai batas 12 mil, sepertiganya kewenangan kabupaten, dan pusat di luar 12 mil. Selain peraturan ini masih memerlukan penjabaran kedalam peraturan lebih teknis, juga menyiratkan perlunya sosialisasi dan pengaturan penataan ruang yang memperhatikan masalah batas-batas kewenangan daerah tersebut.

Dalam menyikapi interpretasi tersebut diperlukan kearifan dan wawasan pengetahuan yang luas. Wilayah negara meliputi wilayah darat dan laut, merupakan satu kesatuan dan tidak dipecah dalam wilayah-wilayah kekuasaan daerah. Wilayah laut berbeda dengan wilayah darat karena bersifat "fluida"nya sehingga tidak memungkinkan untuk membuat batas-batas pengkavlingan yang berarti dapat meniadakan seluruh mekanisme sistem yang ada di dalamnya. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mengembalikan penegasan kewenangan daerah atas pengelolaan sumberdaya alam di wilayahnya. Namun demikian yang harus disadari, bahwa sumberdaya kelautan selain terdiri dari sumberdaya yang bersifat tetap (seperti terumbu karang, mangrove, mineral, jasa lingkungan dan kepariwisataan, dan lain-lainnya) juga sumberdaya yang bersifat mobile/bergerak (seperti perikanan, bahan pencemar dll). Semangat pengelolaan itu hendaknya tidak kemudian diterjemahkan kedalam semangat persaingan untuk mengklaim kekayaan sumberdaya kelautan yang berada dalam batas wilayah administrasinya. Tetapi perlu disadari bersama bahwa di wilayah laut dan pesisir, ada asas rejim "*open access*" dalam konteks yang positif.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Belitung

Kesbangpol dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sendiri belum memiliki strategi khusus terkait dengan kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Namun sebagai implementasi dari nilai cinta tanah air, Pemerintah Kabupaten Belitung memberikan kebutuhan fasilitas melaut bagi para nelayan. Program tersebut diberikan secara bergiliran ke setiap kecamatan di wilayah Belitung, karena sesuai dengan kebutuhan nelayan untuk melakukan aktifitasnya di laut seperti menangkap ikan.

Program Pemerintah Kabupaten Belitung g belum sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Dauly, bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong masyarakat agar dapat hidup mandiri dengan partisipatif aktif. Partisipatif aktif oleh kabupaten Belitung dengan memberikan fasilitas bantuan berupa alat melaut kepada para nelayan belum dapat membantu mengatasi kesulitan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maritim. Hal ini terjadi karena program yang dijalankan oleh Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan alat tangkap ikan yang diajukan nelayan, dengan mengajukan proposal, belum dapat terpenuhi seluruhnya, sesuai yang dibutuhkan. Pengajuan kebutuhan alat tangkap tersebut diajukan secara bergiliran, mengingat jumlah

5 kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Sijuk, Membalong, Badaudan Selat Nasik dengan jumlah desa sebanyak 42 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah 2.293,69 km².

Strategi seperti yang disebutkan oleh General (*Ret*) Andrew J. Good Paster memiliki tiga unsur, yaitu *ends*, *means*, dan *ways*. Ketiga unsur tersebut harus terkandung dalam menjalankan suatu strategi, termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Tujuan (*ends*) dari program TNI AL adalah menyiapkan wilayah pesisir sebagai kekuatan untuk memenangkan perang, membangun kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjalankan tugas pokok TNI AL. Kesemua program TNI AL dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir agar kelak jika ada ancaman yang mengganggu kedaulatan negara, masyarakat tersebut dapat sigap dan mudah untuk dimobilisasi.

Sarana (*means*) yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, seperti ketersediaan gedung pertemuan sebagai sarana menyampaikan informasi, komunikasi belum ada, kemudian sarana bak penampungan sampah untuk warga dengan ukuran yang memadai juga belum ada. Cara (*ways*) yang dilakukan oleh Spotmar Mabelal, Dispotmar Mabelal dan Lantamal III/JT dalam pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan menerapkan strategi atau metode, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Komunikasi sosial. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan Kesbangpol belum mempunyai strategi atau metode dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayahnya. Metode yang digunakan oleh Pemda adalah Desa dan Kelurahan diperintahkan untuk mengajukan proposal kebutuhan alat tangkap ikan nelayan, tetapi dari jumlah yang diajukan, yang dipenuhi tidak seluruhnya.

Strategi TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal III/JKT dalam pemberdayaan wilayah pesisir melalui Bakti TNI Angkatan Laut, Bintangwil dan Komsos. Bakti TNI Angkatan Laut kegiatannya, diantaranya adalah karya bakti, adapun kegiatannya yaitu kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik dilaksanakan Lantamal III/JKT bersama masyarakat secara bergotong-royong dengan sasaran fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mempunyai nilai strategis, yaitu melaksanakan pembersihan pantai dari sampah dan limbah tempurung kelapa. Sedangkan kegiatan non fisik, Kegiatan yang menumbuhkan rasa nasionalisme, berwawasan kebangsaan, bela negara dan cinta tanah air serta meningkatkan keterampilan masyarakat guna mendukung ketahanan wilayah dengan melaksanakan penyuluhan.

Tujuan dan Bakti TNI Angkatan Laut adalah membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan kemanunggalan TNI/TNI AL bersama rakyat dalam menyiapkan secara dini ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara. Bintangwil kegiatan salah satunya adalah aspek potensi demografi yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi diarahkan pada pendataan dan pembinaan sumber daya manusia yang disiapkan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan yang memiliki kesadaran bela negara, cinta tanah air dan kepekaan masyarakat terhadap permasalahan yang timbul, baik secara individu maupun kelompok, guna terwujudnya alat juang yang tangguh. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT dengan menanam jaring rajungan dan kerambah kerang hijau. Tujuan Bintangwil untuk memantapkan

ketahanan wilayah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian TNI-Rakyat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut

Pembinaan komunikasi sosial. Salah satu kegiatannya adalah memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat sebagai upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah itu. Kegiatan yang dilaksanakan Lantamal III/JKT melakukan penyuluhan tentang kesadaran bela negara. Tujuan komunikasi sosial adalah Memberikan pemahaman dalam menyamakan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan laut kepada seluruh komponen bangsa yang berkaitan dengan Ruang, Alat dan kondisi juang serta memelihara dan meningkatkan kemandirian TNI Angkatan Laut dengan masyarakat maritim dalam rangka pertahanan semesta.

Sinergitas, Antara TNI AL Dengan Pemerintah Daerah Dan Aparat Terkait Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Aspotmar selaku staf umum kebijakan potensi maritim melaksanakan sinergitas dengan aktor-aktor pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat pesisir, yaitu Kementerian/Lembaga dan institusi terkait mengomunikasikan bahwa TNI Angkatan Laut mempunyai aktor-aktor pelaksana pemberdayaan masyarakat maritim, yaitu Dispotmar Angkatan Laut dan 14 Pangkalan Utama Angkatan Laut serta 52 Pangkalan Angkatan Laut yang tersebar di seluruh Indonesia yang siap melaksanakan sinergitas di Provinsi dan Pemda setempat. Di dalam struktur organisasi Dispotmar Angkatan Laut sendiri, selain Kepala Dinas sebagai Aktor sinergitas, juga sebagai aktor sinergitas pemberdayaan masyarakat pesisir. Sedangkan Lantamal III/JKT aktor dalam bersinergi dengan Kementerian /Lembaga selain Komandan juga stafnya yaitu Aspotmar dan Kadispotmar Lantamal III/JKT

Sinergitas yang dilakukan oleh Aspotmar, Kadispotmar Mabesal dan Lantamal III/JKT dengan Kementerian/Lembaga meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah lingkup ketahanan pangan seperti budidaya ikan, rajungan dan kerang hijau dengan cara kerambah dan jaring apung. Sinergitas dengan Kementerian Pertahanan juga dilaksanakan dalam penyediaan alat kesehatan untuk Kapal Rumah Sakit TNI AL, sehubungan dengan rencana penambahan pengadaan satu unit lagi kapal rumah sakit untuk membantu kapal yang sudah ada, yaitu KRI. dr. Suharso, mengingat wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan gempa.

Dispotmar dan Lantamal III/JKT juga melaksanakan sinergitas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hasil dari sinergitas berupa kegiatan, yaitu penyuluhan, kerja bakti, dan pembersihan pantai. Namun sinergisinerji ini belum terlaksana secara berkesinambungan, sifatnya hanya insidental saja, sehingga masyarakat pesisir belum merasakan manfaatnya, warga masih merasa kesulitan dalam menjalani hidup sehari-hari. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat menjadi apatis, tidak peduli terhadap lingkungannya. Sinergitas yang dilaksanakan sifatnya semu karena tidak mengomunikasikan atau membahas bentuk kerja sama yang substansi, yaitu apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir dalam mengatasi masalah.

Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas yang dilaksanakan selama ini belum sesuai dengan teori sinergitas Hampden-Turner, bahwa sinergi memerlukan proses yang

melibatkan berbagai institusi untuk melaksanakan kegiatan, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Senada dengan Hampden-Turner, menurut F.M. Hartanto, bahwa Sinergitas memerlukan proses yang melibatkan berbagai Institusi untuk melaksanakan kegiatan, dari berbagai macam gagasan yang dilakukan oleh banyak pihak, hingga menghasilkan kerja sama harmonis, yang dapat menghasilkan suatu gagasan baru, lebih dari apa yang diperkirakan oleh siapapun, bagaimana mengatasi masalah.

Sumberdaya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat pesisir, member-dayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumberdaya alam.

Strategi TNI Angkatan Laut, yaitu Bakti TNI Angkatan Laut, Bintangwil dan Komsos jika dilaksanakan sendiri tanpa sinergi dengan Pemda Kabupaten Belitung pada khususnya dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga pada umumnya yang dilaksanakan secara berkesinambungan sulit terwujud. Hal itu dikarenakan wilayah pesisir binaan Lantamal III/JKT cukup luas dan minimnya anggaran yang dikelola.

Sinergitas yang dilaksanakan oleh Lantamal III/JKT dengan Pemda Kabupaten Belitung dan pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat pesisir belum berjalan dengan baik, aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sinergitas belum bekerja sama dengan maksimal dan masih adanya kendala yang dihadapi yaitu menyatukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat antara Lantamal III/JKT dengan Kabupaten Belitung.

Metode Komunikasi Sosial sebagai salah satu dari tiga metode dalam penyelenggaraan Dawilhanla, yaitu Bakti TNI AL dan Bintangwil dalam pelaksanaannya perlu lebih ditingkatkan. Melalui komunikasi yang intens program kegiatan antara Lantamal III/JKT dengan Kabupaten Belitung dalam pemberdayaan masyarakat, waktunya pelaksanaannya bisa disamakan. Untuk tercapainya Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir, perencanaannya bisa dengan menggunakan skala prioritas, multi years program, yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan

Daftar Pustaka

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo, 2014
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017
- Departemen Kelautan dan Perikanan, *Sumber Daya Kelautan dan perikanan dalam Peremberdayaan Ekonomi Nasional*, 2002
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Marfai, MA. *Pengantar Etika Lingkungan Dan Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: RajaGrafindo, 2015
- Neuwman, W. Lawrence, *Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches*, 2014
- Nontji, Anugerah. *Laut Nusantara Edisi ke-3*, Jakarta: Djambatan, 2005
- Suprihartono, *Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Syarbani, Syahril, Rusdyanta dan Fatkhuri. *Konsep Sosiologi dan Antropologi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Theresia, A. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Tippe, Syarifuddin. *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2016
- Usman, Husaini Usman dan Akbar, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Aksara, 2008
- Warsito. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta. Penerbit Ombak, 2012
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: RajaGrafindo. 2013
- Indrawardhana, I. *Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan Alam*. *Jurnal Komunitas* 4 (1), 2013.
- Irawati, Rina. "Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil", *JIBEKA* (2018): 74. Artikel dalam *Jurnal IBEKA*, No. 1 (2018)
- Lubis, Zulkifli. *Menumbuhkan (Kembali) Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Tapanuli Selatan*. *|| Antropologi Indonesia* 29 (3), 2014.
- Pinto, Zamroni. *Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan*

- Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY*). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 3 (3), 2015.
- Prasetyo, AB. *Peran Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Hutan*. // *Jurnal Akademika* 16(1), 2011.
- Ramadani, Adinda. *Pembinaan kepada Public Relation dalam Hubungan dengan Masyarakat*. Universitas Negeri Padang. 2019.
- Ridwan, M. *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang Muh*. *Ridwan 1, Hartutiningsih 2, Mass'ad Hatuwe 3*. 2014.
- Sardi, Sarwititi Sarwoprasodjo, Djuara P. Lubis, dan Didik Suharjito. *Kearifan Lokal: Sebuah Analisis Sosiologi Komunikasi Di Manggarai Barat*. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Agustus 2019.
- Sukamto, *Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam, Vol.9, No.1*. 2017
- Suwarno, Yogi., Verne, dan Bernadinus Yules Verne, Pribadi, Iwan, *Implementasi Kebijakan Pembinaan Potensi Maritim Terhadap Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut*. *Journal of Public Policy Applied Administration* Vol. 1 No. 2 September. 2019.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

